

## **DEKLARASI JAKARTA TENTANG BURMA, 7 Maret 2008**

**Disusun oleh para peserta konferensi: “Peranan Masyarakat Sipil ASEAN dalam mendukung isu HAM dan Demokrasi di Burma”**

Kami, masyarakat sipil peserta Konferensi dengan tema “*Peranan Masyarakat Sipil ASEAN dalam mendukung isu HAM dan Demokrasi di Burma*” yang dilakukan di Jakarta 6-7 Maret 2008, mendesak pemerintah dan masyarakat ASEAN untuk menolak referendum konstitusi rejim Burma, kecuali jika ada langkah-langkah untuk menjamin kemurnian partisipasi peserta dan proses dialog tripartit yang bermakna dan dalam waktu terbatas.

Perubahan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur proses referendum secara konstitusional dan usulan diadakannya pemilu adalah hal yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Proses referendum yang tidak adil dapat menjurus kepada terjadinya keresahan sosial dan instabilitas politik di Burma, yang pada akhirnya dapat memperparah krisis ekonomi dan memicu arus perpindahan penduduk dalam jumlah besar ke negara tetangga yang telah menganggap bahwa Burma mampu menjaga perbatasannya, mencegah tersebarnya penyakit menular serta memberantas kejahatan trans-nasional.

Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC) telah mengabaikan desakan dari para pemimpin ASEAN untuk melibatkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi pada proses pemilu tahun 2010. Jika ASEAN mengikuti proses yang tidak sesuai hukum ini, maka akan beresiko merendahkan kredibilitasnya sendiri.

Oleh karena itu, kami menghimbau PBB, ASEAN, komunitas internasional dan regional untuk:

- Mendesak dilakukannya referendum yang kredibel dan transparan sesuai dengan standar internasional, termasuk mengizinkan masuknya PBB dan ASEAN untuk melakukan monitoring terhadap referendum dan pemilu.
- Memajukan kondisi referendum dan pemilu nasional yang bebas dan adil untuk menstabilkan transisi menuju demokrasi, khususnya:
  1. Mendeklarasikan dan menerapkan gencatan senjata secara meluas.
  2. Pembebasan tanpa syarat bagi seluruh tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin-pemimpin etnis, pemimpin dari revolusi Saffron dan mereka yang ditahan berdasarkan hukum yang melarang adanya perdebatan mengenai referendum dan konstitusi
  3. Pencabutan undang-undang yang menghalangi kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi dan gerakan
- Aktif mendukung mandat PBB untuk mendorong adanya dialog pembukaan yang substantif antara Aung San Suu Kyi dan pemimpin senior SPDC, dengan sebuah pandangan menuju dialog tri-partit yang akhirnya mengarah pada rekonsiliasi nasional.
- Menjamin bahwa Dewan Keamanan PBB mendukung desakan terhadap embargo senjata global dan sanksi finansial yang terarah.
- Menjamin diterapkannya Resolusi DK PBB dalam konteks Burma, khususnya Resolusi 1674 (perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata), 1612 (perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata) dan 1325 (perlindungan perempuan dan anak-anak perempuan dalam konflik bersenjata)

dan serius menerapkan sanksi dan langkah-langkah yang cukup terarah untuk menyelesaikan hal ini.

Kami sangat percaya bahwa Indonesia, dengan dukungan dari ASEAN dan komunitas internasional, memiliki peranan penting dalam memajukan dialog inklusif yang melibatkan semua pihak dalam masa transisi menuju demokrasi di Burma, diantaranya dengan memasukkan semua pemangku kepentingan masyarakat sipil, bukan rejim semata. Hal ini termasuk segera dilakukannya pekerjaan untuk menciptakan kondisi-kondisi dalam rangka memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok tersebut.

Mengingat ketidakmampuan SPDC dalam merespon krisis kemanusiaan yang mencengkeram bangsa itu, kami mendesak negara-negara ASEAN dan komunitas internasional untuk memenuhi tanggungjawabnya untuk melindungi rakyat Burma. Oleh karena itu, peserta pada konferensi ini mendesak hal-hal berikut:

Pemajuan terhadap HAM:

- Komisi Tinggi HAM seharusnya membentuk perwakilan tetap di Burma untuk melakukan perlindungan dan monitoring yang berkelanjutan dan komprehensif.
- Dewan HAM seharusnya mengirim misi pencari fakta di Burma, yang terdiri dari Pelapor Khusus didukung staff untuk menindaklanjuti kehadiran misi singkat Professor Pinheiro tahun lalu.
- ASEAN harus memulai Komisi Penyelidikan terhadap penyerangan September.

Perlindungan dan Akses Terhadap Kemanusiaan:

- SPDC harus memberikan akses dan monitoring oleh organisasi-organisasi independen dan menghapus batasan terhadap organisasi kemanusiaan termasuk Komisi Internasional Palang Merah (ICRC), di daerah terkena konflik.
- SPDC harus secepatnya menghentikan kekerasan dengan sasaran masyarakat sipil dan penghancuran fasilitas kesehatan dan penyerangan terhadap pegawainya, khususnya di bagian Timur Burma
- SPDC harus menghormati komitmen yang dibuatnya dalam hal pelanggaran HAM di wilayah terkena konflik. Lebih jauh, Pelapor Khusus PBB untuk Anak di Wilayah Konflik Bersenjata harus meningkatkan upaya-upayanya ke arah konteks tersebut.
- SPDC harus menghormati komitmen atas CEDAW termasuk monitoring, khususnya untuk menghentikan kekerasan berbasis gender sebagai senjata perang.
- Pemerintahan ASEAN harus menjamin perlindungan terhadap pencari suaka dan aktivis dalam pelarian di wilayah mereka sesuai dengan standar hukum internasional.

Pembangunan Manusia dan Penghapusan Kemiskinan:

- IFIs (World Bank, IMF, ADB) harus menerapkan proses inklusif yang bermakna, berbagai pemangku kepentingan masyarakat sipil Burma dalam memberi perhatian terhadap krisis ekonomi di Burma

- Komunitas internasional harus melakukan pendekatan yang lebih pro-aktif untuk mendukung masyarakat sipil di Burma untuk persiapan jangka panjang menuju transisi ke demokrasi..

Kami dengan ini memperbaharui komitmen kami untuk mendukung secara aktif dan mengakui keberanian yang abadi dan keteguhan hati rakyat Burma dalam mencari perdamaian dan kebebasan, menyadari bahwa hal ini akan mempererat perdamaian dan kebebasan ASEAN secara keseluruhan.

Selesai